

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Metode Penelitian	18
1.6. Tinjauan Pustaka	19
1.8. Sistematika Penulisan	26
BAB II RATIO DECIDENDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1195K/PID.SUS/2014 TENTANG PENCABUTAN HAK POLITIK	27
2.1. Pengaturan Pidana Tambahan dan Penerapannya Terhadap Putusan	27
2.2. Implementasi Pasal 18 Ayat (1) huruf d undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terhadap Putusan Perkara Korupsi Tentang Pencabutan Hak Politik	34
BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1195K/PID.SUS/2014 TENTANG PENCABUTAN HAK POLITIK	59
3.1. Kriteria penjatuhan Pidana Tambahan berupa pemcabutan hak politik pada terpidana Tindak Pidana Korupsi	59
3.2. Analisis Kasus	64

BAB IV	PENUTUP	70
4.1.	Kesimpulan	70
4.2.	Saran	70

DAFTAR BACAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi yang sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Bacaan.

Surabaya, Oktober 2015

HAMIDI



Persembahanku

Untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku.

Ibuku Hj. Suirah, Bapakku Syamsuri, H.ali Ridho

Mertuaku Dr. H. Abdul Muni, SH. MH, ibu Hj. Asmaniah Ratna

Istriku Fitriah Wulandari SH

Anakku Elsha Pratiwi, Danendra Nurvin Irawan

BudEku Sa'wani

dan

saudaraku Ipung, Desi, Bambang

serta temen-temen seangkatan

